Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah Keagamaan Di Kabupaten Yahukimo

Junyathi Silpa Mangiwa

Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo mengalokasikan sejumlah besar dana hibah keagamaan setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan infrastruktur keagamaan. Namun dalam pelaksanaan program tersebut, seringkali muncul masalah terkait akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas belanja hibah lembaga keagamaan di Kabupaten Yahukimo. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Subjek penelitian ini adalah perwakilan organisasi keagamaan sebagai penerima hibah. Data dikumpulkan melalui studi observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pejabat dan staf Bagian Kesra serta perwakilan organisasi keagamaan penerima hibah. Evaluasi dilakukan terhadap enam tahap pengelolaan belanja hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan tahap yang paling sering mengalami masalah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku, tidak adanya batas waktu dan sanksi dalam Peraturan Bupati, keterbatasan komunikasi dan koordinasi, keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran monitoring dan kompleksnya regulasi pelaksanaan hibah. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengevaluasi kebijakan Peraturan Bupati terhadap ketepatan waktu dan penerapan sanksi pelaporan dana hibah, meningkatkan koordinasi dan memberikan dukungan logistik, melakukan pendampingan dan menyediakan fasilitas, meningkatkan anggaran monitoring, serta menyederhanakan regulasi untuk mempermudah proses pelaporan dan penggunaan dana hibah.

Kata Kunci: *akuntabilitas, hibah, organisasi keagamaan, Kabupaten Yahukimo.*

Abstract

The local government of Yahukimo Regency allocates a significant amount of funds annually for religious grants. This initiative is designed to support a range of activities and facilitate the development of religious infrastructure. However, issues frequently arise during the implementation of this program, particularly concerning accountability in the reporting of fund utilization. The objective of this study is to evaluate the accountability of grant expenditures by religious institutions in Yahukimo Regency. This research employs a qualitative methodology with an exploratory approach. The subjects of this study is religious organizations representative that serve as grant recipients. Data were collected through documentary analysis and in-depth interviews with relevant stakeholders, including officials and staff from the Kesra Division, as well as representatives from the recipient religious organizations. The evaluation was conducted across six stages of grant expenditure

management. The findings indicate that the stages of accountability and reporting are the most susceptible to issues. These challenges can be attributed to several factors, including non-compliance with applicable regulations, the lack of deadlines and sanctions within the Regent's Regulation, limited communication and coordination, resource constraints, insufficient monitoring budgets, and the complexity of grant implementation regulations. To address these challenges, several strategies could be implemented, including: evaluating the Regent's Regulation regarding timely reporting and the enforcement of sanctions for grant fund reporting; enhancing coordination and logistical support; providing assistance and resources; increasing the monitoring budget; and simplifying regulations to facilitate both the reporting process and the effective utilization of grant funds.

Keywords: *akuntability, grant, religious institution, Yahukimo Regency*

Copyright (c) 2025 J.S. Mangiwa

✉ Corresponding author :

Email Address : Faygwen1527@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengimplemetasikan berbagai kebijakan, salah satunya melalui pemberian dana hibah. Menurut Permendagri nomor 77 tahun 2020 hibah didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Akuntabilitas adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemberian dana hibah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari organisasi kepada *stakeholder* yang berhak mendapatkan keterangan tentang kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan organisasi (Sapulette, 2023). Menurut (Mardiasmo, 2002) Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara umum, akuntabilitas merujuk pada kewajiban penerima hibah untuk mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana hibah yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hibah diberikan melalui kerja sama dengan mitra strategis yang berperan penting dalam keberhasilan program pembangunan pemerintah, termasuk lembaga/organisasi keagamaan. Lembaga/organisasi keagamaan berperan dalam pembangunan sosial, penyebaran nilai-nilai moral, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Di Kabupaten Yahukimo, lembaga keagamaan secara rutin menerima sejumlah besar bantuan hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan infrastruktur keagamaan. Melalui pemberian hibah ini, pemerintah berharap lembaga-lembaga keagamaan

dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan spiritual di Kabupaten Yahukimo.

Secara keseluruhan, proses pemberian dana hibah dari Pemda kepada lembaga keagamaan di kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, muncul masalah terkait akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah, sering ditemukan keterlambatan atau bahkan tidak disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari lembaga keagamaan penerima hibah. Masalah ini berdampak pada proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menghambat evaluasi dan pengawasan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Apabila tidak ditangani, kendala ini dapat menurunkan efektivitas program hibah dan tujuan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan hibah keagamaan di Kabupaten Yahukimo. Evaluasi dilakukan terhadap 6 tahap pelaksanaan pengelolaan dana hibah dengan mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi yang berlaku, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merumuskan strategi untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan hibah keagamaan di Kabupaten Yahukimo di masa mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Sampel diperoleh melalui teknik *sampling purposive*. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 perwakilan organisasi lembaga keagamaan di kabupaten Yahukimo yang telah menerima dana hibah pada tahun anggaran 2022-2023. Data dikumpulkan melalui studi observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan secara langsung untuk memantau aktivitas terkait pengelolaan dan pelaporan dana hibah. Studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hibah, seperti peraturan, laporan pertanggungjawaban dan dokumen terkait lainnya yang diperoleh dari Bagian Kesra maupun dari pihak penerima hibah. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program hibah, termasuk 1 orang Bendahara Hibah dan Bansos, 4 orang staf di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Yahukimo, serta 6 perwakilan dari organisasi lembaga keagamaan sebagai penerima hibah. Data dianalisis dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman (Djaman & Komariah, 2010) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses pengolahan data dilakukan secara interaktif dan berulang hingga data jenuh. Uji keabsahan data mengikuti metode kualitatif menurut (Sugiyono, 2016), yang meliputi validitas internal (*credibility*) melalui triangulasi sumber dan teknik, serta reliabilitas (*dependability*) dengan pendampingan pembimbing untuk memeriksa seluruh tahapan penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada evaluasi akuntabilitas pengelolaan belanja hibah lembaga keagamaan di Kabupaten Yahukimo, yang meliputi: (1) prosedur penyaluran dana hibah, (2) kesesuaian pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah dengan regulasi yang telah berlaku, (3)

identifikasi kendala yang dihadapi (4) strategi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan hibah.

1. Prosedur Penyaluran Dana Hibah

Dalam proses pengelolaan belanja hibah keagamaan, Pemda Kabupaten Yahukimo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011) serta pengelola peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 45 Tahun 2022 (Yahukimo, 2022). Berdasarkan Peraturan-peraturan tersebut, prosedur penyaluran dana hibah terdiri dari 6 tahap, yaitu: (i) pengajuan permohonan bantuan dana hibah, (ii) evaluasi permohonan, (iii) penganggaran, (iv) pelaksanaan anggaran, (v) pencairan dan penyaluran hibah dan (vi) pertanggungjawaban dan pelaporan

Tahap pengajuan permohonan bantuan dana hibah dilakukan sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hibah. Pada tahap ini, lembaga keagamaan mengajukan permohonan tertulis berupa proposal kepada Bupati yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi lainnya yang telah mendapat verifikasi oleh Koordinator Wilayah Denominasi Gereja/Lembaga keagamaan. Permohonan ini diajukan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (SETDA). Setelah itu, permohonan dilanjutkan ke SETDA atau Asisten terkait (As. 1/As. 2), kemudian ditampung dan diproses oleh Bagian Kesra SETDA.

Tahap berikutnya adalah evaluasi permohonan dengan melibatkan Koordinator Wilayah Denominasi gereja bagi Lembaga Keagamaan Kristen/Katolik untuk memastikan kelayakan calon penerima hibah. Evaluasi mencakup kebutuhan kegiatan, keberadaan dan domisili organisasi, serta keabsahan dokumen pendukung seperti KTP pengurus, dan SK Pengurus. Hasil evaluasi dirangkum dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pertimbangan lebih lanjut, dengan keputusan akhir ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Tahap ketiga adalah penganggaran. Pada tahap ini, alokasi anggaran hibah berupa uang maupun barang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai dasar rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian nama, alamat penerima, serta besaran hibah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah ditetapkan melalui keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, hibah berupa uang dan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima hibah, memuat rincian hibah, hak dan kewajiban, serta tata cara pencairan dan pelaporan. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Tahap selanjutnya adalah pencairan hibah yang dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan berdasarkan DPA-SKPD. Pada tahap ini, penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan dokumen persyaratan, seperti surat permohonan, NPHD, KTP, rekening bank, kuitansi, dan surat pernyataan tanggung jawab.

Kepala SKPD memerintahkan Bendahara untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan peraturan. Penerima hibah bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut. Hibah berupa uang disalurkan secara langsung ke rekening penerima hibah.

Tahap akhir dari proses pengelolaan dana hibah adalah Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Penerima hibah lembaga keagamaan bertanggung jawab mutlak baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang telah diterima. Tanggung jawab Pihak penerima hibah berupa uang yaitu menyediakan laporan penggunaan dana, pakta integritas dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak penerima hibah berupa barang/jasa bertanggungjawab menyediakan laporan penggunaan, surat pernyataan tanggung jawab, dan salinan bukti serah terima barang/jasa. Pertanggungjawaban pemberi hibah atas hibah meliputi: permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati, NPHD, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dan SPM/SP2D serta bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pelaporan penggunaan hibah keagamaan, baik berupa uang maupun barang/jasa, disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD (Bagian Kesra SETDA Laporan tersebut mencakup surat pengantar, laporan kegiatan (termasuk latar belakang, tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, personalia, dan penutup), laporan keuangan (realisasi penerimaan dan penggunaan hibah), serta lampiran yang relevan. Laporan tersebut harus bermaterai, ditandatangani, dan dibubuhi cap oleh pihak yang berwenang. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah, sementara hibah barang/jasa dicatat pada belanja barang dan jasa, dengan barang yang belum diserahkan dicatat sebagai persediaan di neraca SKPD.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Hibah dengan Regulasi yang Berlaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dalam proses pengelolaan belanja hibah kepada lembaga keagamaan, Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah sebagai acuan utama bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga menerapkan Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo. Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai prosedur pemberian, penggunaan, dan pertanggungjawaban hibah serta bantuan sosial, memastikan dana hibah tersalurkan secara tepat sasaran, sesuai peraturan, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Namun, kurangnya sosialisasi peraturan kepada staf Bagian Kesra menyebabkan sebagian staf kurang memahami tentang pengelolaan hibah yang sesuai aturan tersebut. Menurut Solihin, indikator minimum untuk mengukur akuntabilitas meliputi beberapa aspek yaitu : 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Adanya output dan outcome yang

terukur (Solihin, 2007). Kesesuaian proses pengelolaan belanja hibah pada lembaga keagamaan dengan regulasi yang berlaku secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas hibah lembaga keagamaan di Kabupaten Yahukimo dari tahap 1-5 sudah sesuai, sedangkan tahap 6 belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal tersebut merupakan suatu tantangan yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Tabel 1. Kesesuaian pelaksanaan akuntabilitas hibah dengan regulasi yang berlaku

Tahapan	Penjelasan	Peraturan yang Berlaku	Kesesuaian*
Pengajuan permohonan bantuan hibah	Lembaga keagamaan mengajukan proposal permohonan bantuan melalui Bagian Umum SETDA dengan persetujuan Koordinator Wilayah. Proposal diverifikasi oleh Bagian Kesra	a. Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 b. Peraturan Bupati Yahukimo No. 45 Tahun 2022	☑
Evaluasi permohonan hibah	Bagian Kesra mengevaluasi kesesuaian proposal dengan dokumen pendukung, jenis kegiatan, dan keberadaan organisasi. Hasil rekomendasi disampaikan ke TAPD untuk pertimbangan.	Peraturan Bupati Yahukimo No. 45 Tahun 2022	☑
Penganggaran belanja hibah	Hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD dan RKA-SKPD, serta dirinci dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Bupati menetapkan daftar penerima hibah melalui keputusan .	a. Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 b. Peraturan Bupati Yahukimo No. 45 Tahun 2022	☑
Pelaksanaan anggaran hibah	Pelaksanaan berdasarkan DPA-SKPD, SK Bupati daftar penerima hibah , dengan NPHD yang mencantumkan hak, kewajiban, dan rincian penggunaan hibah.	a. Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 b. Peraturan Bupati Yahukimo No. 45 Tahun 2022	☑
Pencairan dan penyaluran hibah	Pencairan melalui SP2D setelah verifikasi dokumen lengkap. Dana langsung ditransfer ke rekening organisasi/lembaga.	a. Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 b. Peraturan Bupati Yahukimo No. 45 Tahun 2022	☑
Pelaporan dan pertanggungjawaban	Penerima hibah melaporkan penggunaan dana. Tidak ada batas waktu dan sanksi yang dijelaskan dalam Perbup, sehingga laporan sering terlambat, bahkan tidak mengumpulkan laporan.	a. Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 b. Peraturan Bupati Yahukimo No. 45 Tahun 2022	⚠

☑ sudah sesuai

⚠ belum sepenuhnya sesuai

3. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Pada Belanja Hibah

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2022-2023, ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, yaitu:

- (i) **Laporan pertanggungjawaban dari lembaga keagamaan penerima bantuan terlambat:** penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lambat 10 Januari tahun berikutnya, namun laporan hibah yang direalisasikan di akhir tahun anggaran sering terlambat disampaikan.
- (ii) **Laporan pertanggungjawaban dari lembaga keagamaan penerima bantuan disampaikan:** penyaluran hibah dilakukan melalui transfer kas daerah ke penerima hibah dengan NPHD. Penerima hibah diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah beserta dokumentasi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Namun, laporan tersebut sering kali tidak disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

Meskipun telah mendapat peringatan dari BPK-RI, namun fenomena ini terjadi secara berulang setiap tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja hibah, terutama pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban belum dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan ini berdampak pada akuntabilitas belanja hibah di Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo. Permasalahan ini diakibatkan oleh sejumlah kendala, termasuk ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku, tidak ada batas waktu dan sanksi, keterbatasan komunikasi dan koordinasi, keterbatasan kompetensi sumber daya, keterbatasan anggaran monitoring dan regulasi pelaksanaan hibah yang kompleks.

3.1 Ketidakpatuhan pada Peraturan Yang Berlaku

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan (Siat & Toly, 2012). Sebaliknya ketidakpatuhan adalah Keadaan tidak mematuhi atau memenuhi (atau hanya mematuhi atau memenuhi sebagian) komitmen, kebijakan, atau kewajiban lainnya, dimana dalam konteks Kerangka Akuntabilitas, tidak terpenuhinya komitmen dan kebijakan sukarela, ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku (AFI, 2022). Contoh ketidakpatuhan pada peraturan misalnya: lupa membuat laporan pertanggungjawaban, masalah waktu, nota yang belum terkumpul, tanda terima atau kwitansi yang tidak ada atau tidak dibuat, dan lain sebagainya. Ketidakpatuhan merupakan kendala yang paling sering terjadi dan menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Yahukimo.

Seharusnya penerima hibah bertanggung jawab penuh atas penggunaan hibah yang diterima dengan melaporkan penggunaan, menandatangani pakta integritas, dan menyertakan bukti pengeluaran yang sah. Namun fakta yang terjadi adalah banyak penerima bantuan hibah, termasuk di lembaga/organisasi keagamaan yang terlambat dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bahkan ada juga yang ditemukan tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya laporan pertanggungjawaban penerima hibah yang menyebabkan ketidak patuhan pada peraturan yang berlaku.

3.2 Kendala Tidak adanya Batas Waktu dan Sanksi dalam Peraturan Bupati

Kendala lain yang ditemukan adalah tidak ada batas waktu dan sanksi yang ditetapkan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah pada Peraturan Bupati. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing untuk memperbaiki kesalahan.

3.3 Kendala Komunikasi dan Koordinasi akibat Kondisi Geografis dan Keterbatasan Sinyal di Daerah

Kabupaten Yahukimo memiliki banyak distrik yang terletak di daerah yang sulit dijangkau. Beberapa wilayah hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat terbang sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal. Wilayah lainnya dapat dijangkau dengan kendaraan lain, atau bahkan dengan berjalan kaki namun membutuhkan waktu berhari-hari. Selain kondisi geografis yang sulit dijangkau, beberapa wilayah di Kabupaten Yahukimo juga masih sangat terbatas dalam mengakses sinyal untuk berkomunikasi, bahkan beberapa diantaranya belum memiliki telepon seluler yang dapat dihubungi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya komunikasi dan koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah (dalam hal ini Kesra) sebagai pemberi bantuan hibah dan pihak organisasi lembaga keagamaan sebagai penerima bantuan hibah. Akibatnya setelah proses pencairan dana hibah telah dilaksanakan, staf pada bagian Kersa sulit untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Meskipun komunikasi dan koordinasi telah dilakukan pada saat tahap sosialisasi dan pelaksanaan hibah, namun informasi mengenai batas waktu pengumpulan laporan sering tidak disampaikan dengan jelas kepada penerima hibah sehingga penerima hibah terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Akibatnya proses pengawasan serta pertanggungjawaban dana menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi merupakan kendala utama yang menghambat kelancaran proses akuntabilitas dalam penggunaan hibah di daerah-daerah yang sulit dijangkau di Kabupaten Yahukimo.

3.4 Kendala Keterbatasan Sumber Daya

Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, diperlukan kompetensi sumber daya yang memadai. Kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang dan bisa membuat orang tersebut mampu untuk memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan (Anatasia, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima hibah memiliki keterbatasan kompetensi sumber daya, yaitu tidak adanya tenaga administrasi yang mampu menyusun laporan pertanggungjawaban. Selain itu, fasilitas seperti printer dan laptop sangat terbatas, sehingga penerima bantuan sering harus menggunakan layanan rental komputer, yang memerlukan biaya besar. Kendala ini semakin mempersulit proses pelaporan yang seharusnya dilakukan. Setiap tahun, bagian Kesra telah melakukan sosialisasi pertanggungjawaban dana hibah kepada pihak penerima bantuan, namun pelaksanaannya hanya 1 kali dalam satu tahun. Dalam Peraturan Bupati juga sudah ada format laporan yang baku, namun belum dibagikan kepada penerima bantuan saat pelaksanaan hibah sehingga perlu adanya kegiatan bimbingan yang intensif kepada pihak penerima hibah terkait pelaporan dan pertanggungjawaban.

3.5 Kendala Keterbatasan Anggaran Monitoring Bantuan Hibah

Monitoring adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap suatu aktivitas, proses, atau sistem untuk memantau perkembangan, performa, atau perubahan dengan tujuan utama untuk mendapatkan informasi tentang kondisi atau kinerja suatu entitas dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya (Fahmi, 2023). Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 45 Tahun 2022 Bab X pasal 50 menyatakan bahwa SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan Bansos. Penelitian menunjukkan bahwa Bagian Kesra telah melakukan monitoring terhadap penerima bantuan hibah terkait pelaporan dan pertanggungjawaban, namun belum maksimal karena terbatasnya anggaran daerah. Monitoring hanya dilakukan di daerah yang mudah dijangkau dan disesuaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Bahkan beberapa tahun anggaran tidak tersedia anggaran untuk monitoring pelaksanaan hibah.

3.6 Kendala Regulasi Pelaksanaan Hibah yang Kompleks

Regulasi yang kompleks berpengaruh pada biaya-biaya pengurusan yang besar termasuk biaya transportasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Apabila proses pencairan dana dilakukan di akhir-akhir bulan tahun anggaran, hal ini akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan oleh penerima hibah, karena keterbatasan akses dan proses administrasi yang memakan waktu. Kendala ini menghambat kelancaran monitoring dan akuntabilitas penggunaan dana hibah.

Kendala-kendala tersebut tidak hanya ditemukan di Kabupaten Yahukimo, tetapi juga terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia, termasuk Kabupaten Buru Selatan (Pattimura, 2023), Kota Manado (Runtuwarouw et al., 2019), Provinsi Sumatera Utara (Barus & Nasution, 2022), Kota Yogyakarta (Wardoyo et al., 2022), dan kota Salatiga (Febrina, 2017). Oleh karena itu diperlukan strategi yang dapat mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah, terutama pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

4. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Hibah Keagamaan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara (KSAP, 2013). Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait pada aspek akuntansi, tetapi juga pada berbagai aspek lainnya, seperti: penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah. Pelaporan keuangan yang transparan dan akurat merupakan salah satu wujud akuntabilitas. Dalam meningkatkan akuntabilitas publik, penyampaian laporan pertanggungjawaban dana hibah sangatlah penting. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo untuk meningkatkan akuntabilitas hibah keagamaan yaitu :

4.1 Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati terhadap Ketepatan Waktu dan Penerapan Sanksi Pelanggaran Pelaporan Dana Hibah

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu dan kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat ketika mengambil keputusan (Arikunto & Jabar, 2007). Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan mengkaji ulang Peraturan Bupati dengan menambahkan ketentuan

mengenai batas waktu pengumpulan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah serta mekanisme pemberian sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar aturan tersebut guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah.

4.2 Optimalisasi Koordinasi dan Dukungan Logistik

Optimalisasi koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan koordinator wilayah atau kepala distrik dalam pelaporan hibah. Sementara itu, dukungan logistik dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana khusus untuk transportasi pelaporan, bagi penerima maupun petugas yang mengumpulkan laporan langsung di daerah. Selain itu perlu mewajibkan penerima hibah di daerah tanpa sinyal menunjuk fasilitator yang memiliki kontak aktif yang dapat dihubungi. Fasilitator dapat membantu komunikasi, mengingatkan pelaporan dan berkoordinasi dengan Kesra. Lebih dari itu kerjasama dengan kepala distrik/kampung perlu ditingkatkan.

4.3 Pendampingan dan Penyediaan Fasilitas

Pendampingan dapat dilakukan dengan membentuk tim pendamping di bagian Kesra untuk mengingatkan, mengawasi dan membantu penerima hibah dalam menyusun laporan. Tim pendamping dapat memberikan format laporan saat penandatanganan NPHD. Selain pendampingan, perlu disediakan fasilitas seperti kompoter/laptop dan printer di kantor Kesra yang dapat membantu penerima hibah dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dan hibah.

4.4 Peningkatan Anggaran Monitoring

Alokasi anggaran monitoring dalam APBD perlu dikaji kembali dan ditingkatkan sekitar 2-5 % dari total dana hibah. Peningkatan anggaran dapat digunakan untuk kunjungan lapangan, pelatihan penerima dan pengolahan data laporan, guna memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.

4.5 Mengkaji Regulasi yang lebih sederhana

Regulasi yang terlalu kompleks dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah dapat dikaji ulang agar lebih sederhana dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar pencairan dana hibah dapat dilakukan lebih cepat sehingga ada banyak waktu bagi penerima hibah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang telah diterima.

Dengan melakukan sejumlah strategi tersebut, diharapkan kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi sehingga permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah, khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi maka secara keseluruhan, tahap pelaksanaan pengelolaan dana hibah akan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana keagamaan di Kabupaten Yahukimo.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan hibah keagamaan di Kabupaten Yahukimo terdiri dari 6 tahap. Dari 6 tahap tersebut, tahap 1-5 sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, sedangkan tahap 6, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai. Hal tersebut disebabkan karena berbagai kendala yang dihadapi, antara lain: ketidakpatuhan terhadap

peraturan, tidak adanya batas waktu dan sanksi dalam Peraturan Bupati terkait pelaporan dana hibah, keterbatasan komunikasi dan koordinasi akibat kondisi geografis, keterbatasan kompetensi sumber daya, keterbatasan anggaran monitoring dan regulasi yang kompleks. Adapun sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Bupati terkait ketepatan waktu dan penerapan sanksi pelanggaran pelaporan dana hibah, meningkatkan koordinasi dan memberikan dukungan logistik, melakukan pendampingan dan menyediakan fasilitas, meningkatkan anggaran monitoring, serta menyederhanakan regulasi untuk mempermudah proses pelaporan dan penggunaan dana hibah.

Referensi :

- (AFI), A. F. I. (2022). *Ketidakpatuhan*. <https://accountability-framework.org/id/use-the-accountability-framework/definitions/ketidakpatuhan/>
- Anatasia, A. (2022). *Apa Itu Kompetensi? Ini Pengertian, Faktor-faktor, dan Indikatornya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5988134/apa-itu-kompetensi-ini-pengertian-faktor-faktor-dan-indikatornya>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2007). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Barus, K. B., & Nasution, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 327. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i4.2087>
- Djaman, S., & Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Fahmi, M. (2023). *Monitoring dan Evaluasi: pengertian, Manfaat dan Tujuan di Era Digital*. <https://nolimit.id/blog/monitoring-dan-evaluasi-pengertian-manfaat-dan-tujuan-di-era-digital/>
- Febrina, A. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Salatiga*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- KSAP. (2013). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13*. <https://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-13/>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Pattimura, U. (2023). *SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Akuntabilitas Kabupaten Buru Selatan Pelaporan Belanja Hibah*. 6(2), 257–270.

- Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019). Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 89. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24976>
- Sapulette, S. G. (2023). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya Christian. *Jurnal Akuntansi,* 03(1), vol 8.
- Solihin, D. (2007). *Indikator Governance dan penerapannya dalam mewujudkan Demokratissi di Indonesia*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Wardoyo, D. U., Rachma, A. A., DWI N, A. I., & HANIF, A. (2022). Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintahan Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan,* 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v2i2.243>
- Yahukimo, P. K. (2022). *Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo*.